

**TAHUN  
2019**



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



## **BPBD DIY**

Jalan Kenari No. 14a, Yogyakarta,  
Telp (0274) 555836, Fax (0274) 554206  
Website: [bpbddiy.jogjaprov.go.id](http://bpbddiy.jogjaprov.go.id)

# Kata Pengantar

---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY (BPBD DIY) Tahun 2019 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. LKJIP BPBD DIY Tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKJIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 7 Februari 2020

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY



Drs. BIWARA YUSWANTANA, M.Si  
NIP. 19630817 198909 1 001

# Ikhtisar Eksekutif

---

Capaian kinerja BPBD DIY tahun 2019 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis pada BPBD DIY yakni **“Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana”**:
  - Diukur dengan ***Indeks Ketahanan Daerah*** berdasarkan Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Program, yakni Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana dan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
  - Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja BPBD DIY juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan SDGs / TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) DIY.
  - Target capaian indikator sasaran tahun 2019 sebesar 71; sampai dengan bulan Desember 2019 terealisasi 72,5. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai **102%**.
  - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2018 sebesar **100,7% dari target** terjadi peningkatan sebesar 1,3%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY ke depan, sebagai berikut:

- Kerentanan bencana di DIY meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perubahan pola pemanfaatan lahan dan perubahan iklim.
- Kapasitas dalam menghadapi bencana di DIY belum merata dan masih memerlukan penguatan pada semua aspek kapasitas.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai pijakan bagi BPBD DIY untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang.

# Daftar Isi

---

KATA PENGANTAR .....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	3
DAFTAR ISI .....	4
DAFTAR TABEL .....	5
DAFTAR GAMBAR .....	6
BAB I PENDAHULUAN .....	7
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah .....	7
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur BPBD DIY .....	8
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan .....	10
1.4 Isu-isu Strategis .....	12
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran .....	14
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2018 .....	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	19
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD .....	19
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	20
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2019 .....	20
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	22
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja .....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	23
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2019 .....	23
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2019 .....	26
3.3. Analisis Capaian Kinerja Lainnya .....	26
3.4. Realisasi Anggaran .....	29
3.5. Inovasi .....	30
BAB IV PENUTUP .....	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	

# Daftar Tabel

---

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi .....	14
Tabel I.2 Sarana-Prasarana .....	16
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2018 dan 2019 .....	17
Tabel II.1 Sasaran Strategis BPBD DIY 2017-2022 .....	20
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	20
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2019 .....	21
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2019 .....	21
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana BPBD DIY Tahun 2019.....	22
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	23
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2019 .....	24
Tabel III.3 Rumusan Indkator dan Formulasi Perhitungan.....	24
Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja.....	25
Tabel III.5 Target dan Capaian Indikator SDGs/TPB BPBD DIY Tahun 2019 .....	27
Tabel III.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2019 .....	29

# Daftar Gambar

---

Gambar I.1. Cascading Kinerja.....	8
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur BPBD DIY .....	9
Gambar I.3. Tugas dan Fungsi Organisasi BPBD DIY.....	10
Gambar I.4. Peta Jabatan pada Organisasi BPBD DIY.....	11
Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK,Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP .....	22
Gambar III.1 Data Series Kejadian Bencana di DIY periode 2015-2019 .....	29
Gambar III.2 Sistem informasi kebencanaan InaWARE .....	31
Gambar III.3 Sistem informasi kebencanaan PAMOR .....	31
Gambar III.4 Sistem informasi kebencanaan DIBI .....	31

# BAB I

## Pendahuluan

### **Bab I berisi :**

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun sebelumnya*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

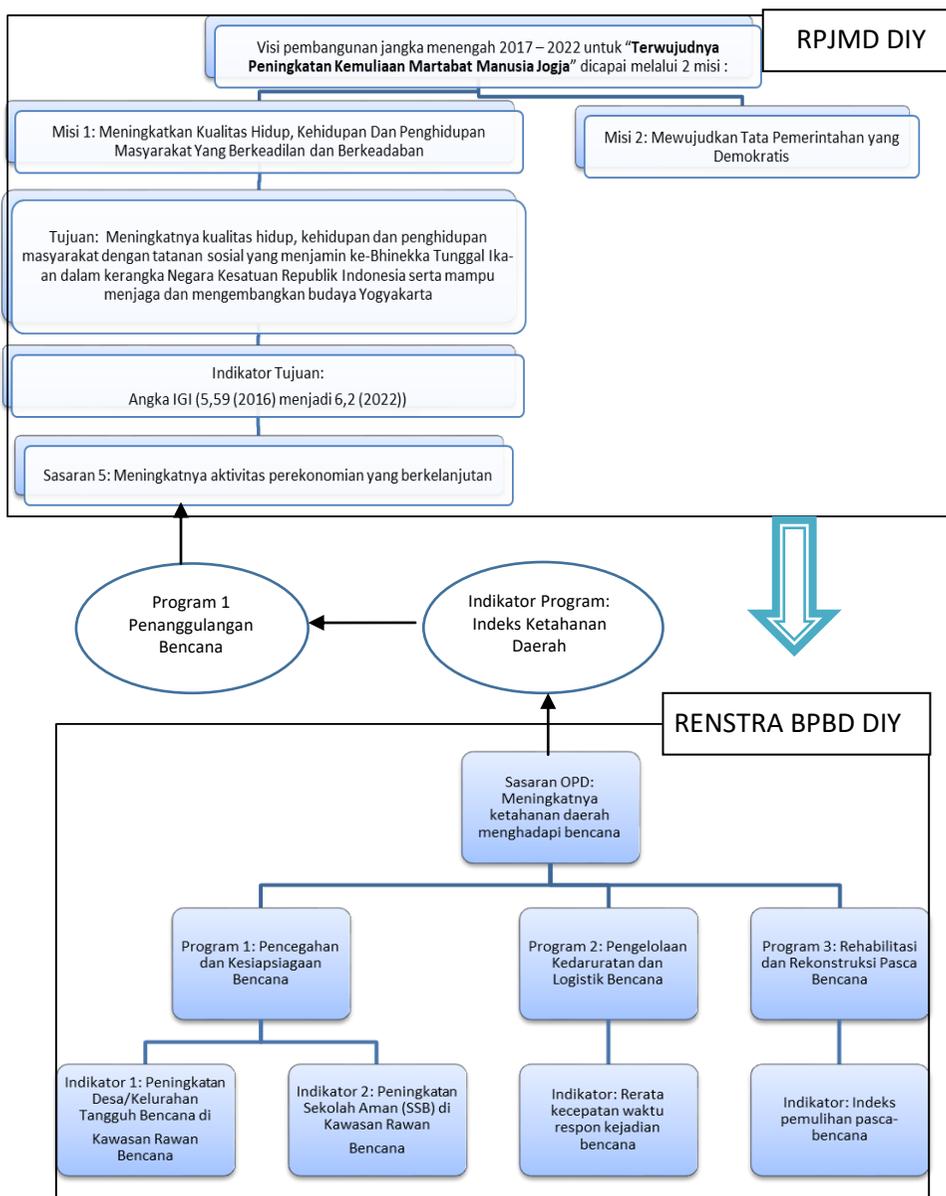
Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

### **1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah**

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. BPBD DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

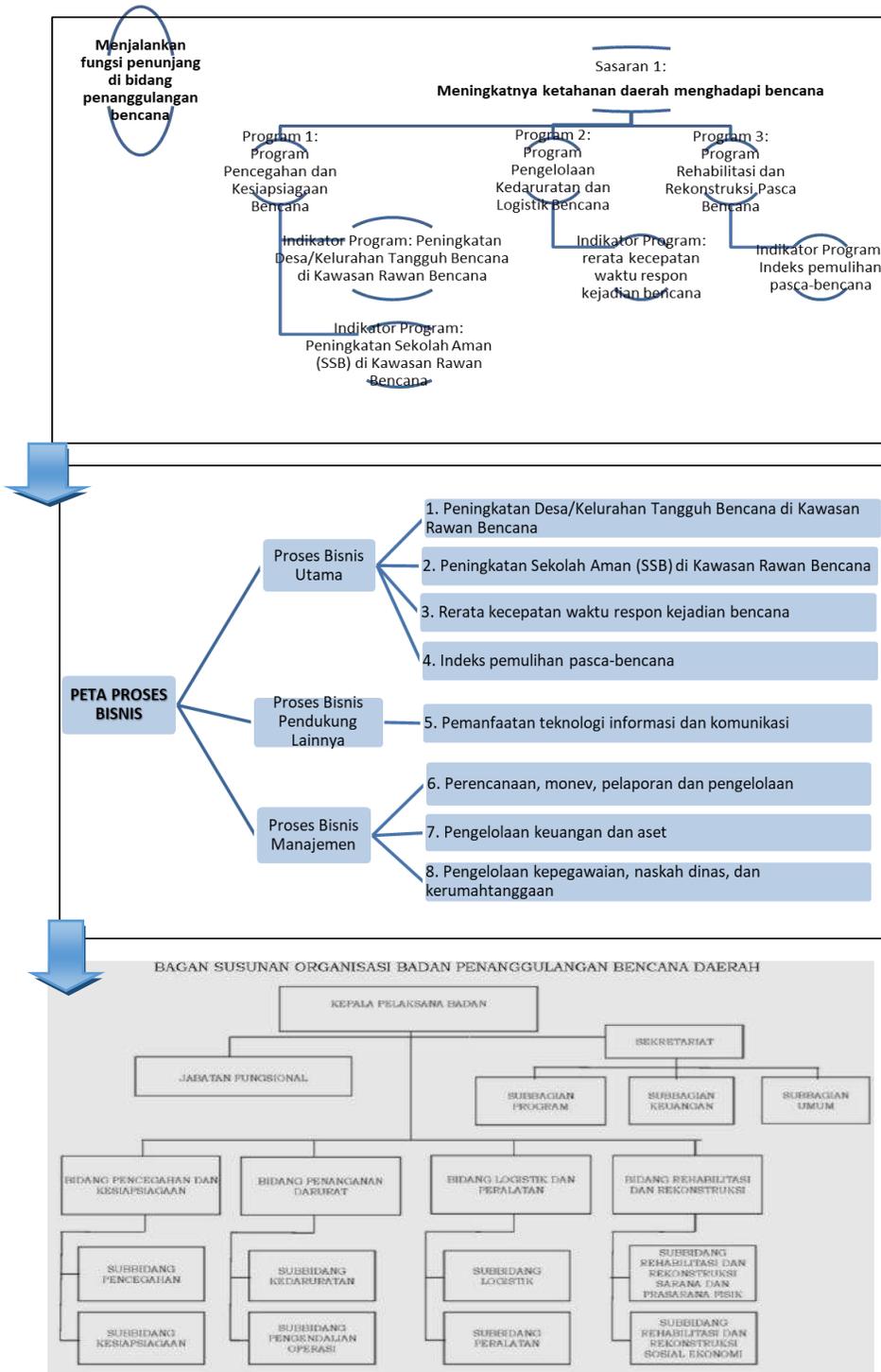
**Gambar I.1 Cascading Kinerja**



## 1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur BPBD DIY

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi BPBD DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur BPBD DIY



### 1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, BPBD DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

**Gambar 1.3. Tugas dan Fungsi Organisasi BPBD DIY**

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang penanggulangan bencana. Adapun fungsi BPBD DIY sebagai berikut:

1. penyusunan program kerja Badan;
2. perumusan, penetapan pedoman dan pengarahannya penyelenggaraan kebijakan teknis urusan penanggulangan bencana di daerah;
3. penetapan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
4. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
5. penyusunan, penetapan, penginformasian peta risiko bencana dan prosedur tetap penanganan bencana;
6. pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan;
7. pelaksanaan komando penanganan darurat bencana;
8. pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah;
9. pemberian rekomendasi tingkatan dan status bencana;
10. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana;
11. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana kabupaten/kota;
12. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
13. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
14. pelaksanaan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Sumber: Perdas DIY No. 1 Tahun 2018 dan Pergub DIY No. 80 Tahun 2018*

**Gambar I.4. Peta Jabatan pada Organisasi BPBD DIY**

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi, sumberdaya manusia BPBD DIY dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana
1. Kepala Pelaksana	1. Dibawah Kasubbag Program: 1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 2) Pengelola Sistem dan Jaringan
2. Sekretariat: 1) Kasubbag Program 2) Kasubbag Keuangan 3) Kasubbag Umum	2. Dibawah Kasubbag Keuangan: 1) Bendahara 2) Pengadministrasi Keuangan 3) Pengelola Gaji 4) Pengelola Akuntansi 5) Verifikator Data Laporan Keuangan
3. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan: 1) Kasubbid Pencegahan 2) Kasubbid Kesiapsiagaan	3. Dibawah Kasubbag Umum: 1) Pengadministrasi Umum 2) Pengadministrasi Persuratan 3) Pranata Kearsipan 4) Pengadministrasi Kepegawaian 5) Teknisi Sarana dan Prasarana 6) Pengelola Barang Milik Negara 7) Pengemudi
4. Kabid Penanganan Darurat: 1) Kasubbid Kedaruratan 2) Kasubbid Pengendalian Operasi	4. Dibawah Kasubbid Pencegahan: 1) Pengadministrasi Umum 2) Analisis Mitigasi Bencana
5. Kabid Logistik dan Peralatan: 1) Kasubbid Logistik 2) Kasubbid Peralatan	5. Dibawah Kasubbid Kesiapsiagaan: 1) Analisis Bencana
6. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi: 1) Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik 2) Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi	6. Dibawah Kasubbid Kedaruratan: 1) Pengadministrasi Umum 2) Analisis Penanggulangan Krisis 7. Dibawah Kasubbid Pengendalian Operasi: 1) Pengelola Pengendalian dan Operasional 8. Dibawah Kasubbid Logistik: 1) Pengadministrasi Umum 2) Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik 9. Dibawah Kasubbid Peralatan 1) Pengelola Sarana Operasi 10. Dibawah Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik 1) Pengadministrasi Umum 2) Penyusun Rencana Rehabilitasi 11. Dibawah Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi 1) Penyusun Rencana Rehabilitasi

Sumber: Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 tahun 2018

#### 1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi BPBD DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan "Menurunkan risiko bencana", antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - a. Koordinasi pengurangan risiko bencana melalui sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan bidang kebencanaan, lingkungan hidup dan perubahan iklim;
  - b. Penyediaan kajian risiko bencana sampai tingkat kabupaten/kota, peningkatan sosialisasi pengurangan risiko bencana, dan penyediaan pedoman operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - c. Memulai upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;
  - d. Penataan fokus kegiatan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat, dan kesiapsiagaan berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi, jenis bencana dan daerah rawan bencana serta strategi pencapaiannya secara terencana dan terukur
  - e. Pengembangan PRBBK (pengurangan risiko bencana berbasis komunitas) dengan mengoptimalkan peran serta swasta, lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat, pembentukan dan pembinaan platform nasional, forum pengurangan risiko bencana, pembentukan dan sertifikasi relawan, serta pembentukan desa tangguh bencana;
  - f. Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu ditingkatkan melalui klaster-klaster penanggulangan bencana, perencanaan kesiapsiagaan, pengembangan kapasitas kesiapsiagaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini yang dimulai pada tingkat komunitas/masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung

kesiapsiagaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumberdaya tersedia;

- g. Pengelolaan sumberdaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara efektif dan efisien dimulai dengan membangun sistem data dan informasi yang terkoneksi pada sistem informasi penanggulangan bencana;
- h. Pembangunan database dan sistem informasi kinerja pencegahan dan kesiapsiagaan berkoordinasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas;
- i. Menyelesaikan masterplan pengurangan risiko bencana tsunami dan menyusun masterplan pengurangan risiko bencana lainnya sesuai ancaman spesifik DIY;
- j. Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

## 2. Bidang Penanganan Darurat

- a. Membangun sistem operasi, pembinaan, pengelolaan dan pengerahan sumberdaya nasional dan daerah untuk tanggap darurat bencana yang cepat, efektif dan efisien;
- b. Belum optimalnya mekanisme penanganan kedaruratan;
- c. Percepatan perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana melalui pengkoordinasian dan mobilisasi sumberdaya nasional dan daerah;
- d. Peningkatan pengendalian dan kualitas tata kelola belanja tak terduga dan dana siap pakai (*on call*) melalui kerjasama dan pendampingan dengan pihak-pihak yang melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan;
- e. Membangun database dan sistem informasi kinerja pelayanan bidang penanganan darurat baik internal, antar kabupaten/kota, maupun yang terintegrasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB.

## 3. Bidang Logistik dan Peralatan

- a. Pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan sesuai standar minimal sampai tingkat kabupaten/kota termasuk dukungan distribusi dan pengelolaan yang berkualitas;
- b. Tingginya spesifikasi teknologi peralatan kebencanaan, maka diperlukan adanya pelatihan operasional dan pemeliharaan peralatan kebencanaan secara berkesinambungan;
- c. Belum optimalnya mekanisme pemberian dan distribusi bantuan;

- d. Belum optimalnya manajemen penyediaan, pengelolaan dan distribusi logistik dan peralatan, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas penyediaan, pengelolaan, distribusi untuk kesiapsiagaan dan untuk dukungan penanganan darurat bencana;
  - e. Membangun database dan sistem informasi kinerja pelayanan bidang logistik dan peralatan baik internal, antar kabupaten/kota, maupun yang terintegrasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB.
4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- a. Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan metode pengkajian kebutuhan pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
  - b. Belum optimalnya mekanisme perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - c. Membangun koordinasi dan mekanisme dengan bidang penanganan darurat untuk manajemen, pengelolaan penanganan pengungsi maupun kerusakan fisik dan sosial ekonomi akibat bencana.
  - d. Membangun koordinasi dan mekanisme pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di luar DIY yang berdampak pada kehidupan mahasiswa yang tinggal / warga pendatang sementara di DIY.

### 1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumberdaya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi**

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Perempuan
A.	Jabatan Struktural						
1.	Kepala Pelaksana	1	S2, S1	1	S2	1	
2.	Sekretaris	1	S2, S1	1	S1	1	
3.	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	S2, S1	1	S2	1	
4.	Kabid Penanganan Darurat	1	S2, S1	1	S1	1	
5.	Kabid Logistik dan Peralatan	1	S2, S1	1	S2	1	
6.	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	S2, S1	0			
7.	Kasubbag Program	1	S2, S1	1	S2		1
8.	Kasubbag Keuangan	1	S2, S1	1	S2	1	
9.	Kasubbag Umum	1	S2, S1	1	S2	1	

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Perempuan
10.	Kasubbid Pencegahan	1	S2, S1	1	S1	1	
11.	Kasubbid Kesiapsiagaan	1	S2, S1	1	S2	1	
12.	Kasubbid Kedaruratan	1	S2, S1	1	S1	1	
13.	Kasubbid Pengendalian Operasi	1	S2, S1	1	S1	1	
14.	Kasubbid Logistik	1	S2, S1	1	S2	1	
15.	Kasubbid Peralatan	1	S2, S1	1	S2	1	
16.	Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik	1	S2, S1	0			
17.	Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi	1	S2, S1	1	S1		1
B.	Jabatan Pelaksana Substantif						
18.	Analisis Mitigasi Bencana	4	S1	2	S1	1	1
19.	Analisis Bencana	4	S1	3	S1	1	2
20.	Analisis Penanggulangan Krisis	4	S1	2	S2, S1	1	1
21.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	2	S1	1	S2		1
22.	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	3	S1	1	SMK		1
23.	Penyusun Rencana Rehabilitasi	6	S1	3	S1, SMA	3	
24.	CPNS			2	S1	1	1
C.	Jabatan Pelaksana Pendukung/ Administratif						
25.	Bendahara	1	S1	1	SMA		1
26.	Verifikator Data Laporan Keuangan	1	D3	1	SMA		1
27.	Pengelola Akuntansi	1	D3	0			
28.	Pengelola Barang Milik Negara	2	D3	1	S1	1	
29.	Pengelola Gaji	1	D3	1	S2		1
30.	Pengelola Sistem dan Jaringan	1	S1, D4	1	S2		1
31.	Pengelola Pengendalian dan Operasional	4	S1	2	S1		2
32.	Pengelola Sarana Operasi	3	S1	1	S1		1
33.	Pengadministrasi Kepegawaian	1	D3	0			
34.	Pengadministrasi Keuangan	4	D3	2	SMA	1	1
35.	Pengadministrasi Umum	5	D3	4	SMA	4	
36.	Pengadministrasi Persuratan	1	D3	1	SMA		1
37.	Pranata Kearsipan	1	D3	1	SMA	1	
38.	Pengemudi	1	SMA/K	1	SMA	1	
39.	Teknisi Sarana dan Prasarana	1	D3	1	SMA	1	
	Jumlah	68		47		29	18

Sumber: Data Kepegawaian BPBD DIY per Desember 2019

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM BPBD DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 20 orang (42.55%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 13 orang (27.66%), SLTA 14 orang (29.79%). Komposisi pegawai laki-laki

sebanyak 29 orang (61,70%) lebih banyak dibanding pegawai perempuan 17 orang (38,30%), bahkan dari 17 jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki, hanya 2 jabatan struktural yang dipegang oleh perempuan. Hal ini menunjukkan belum terpenuhinya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 21 orang, terdiri dari 2 orang jabatan struktural, 9 orang pejabat pelaksana substantif dan 10 pejabat pelaksana administratif. Terdapat 4 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif dan 8 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pendukung. Terdapat satu unit kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang menangani 1 (satu) program dengan 2 (dua) kegiatan tetapi hanya didukung 1 (satu) orang Pejabat Struktural Eselon IV, dan 3 (tiga) orang Penyusun Rencana Rehabilitasi. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi fungsi BPBD DIY sebagai penyelenggara penanggulangan bencana terutama pada tahap pasca bencana.

**Tabel I.2 Sarana-Prasarana**

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Aset Tetap		
1	Tanah	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Peralatan dan Mesin	<b>1.478 unit</b>	<b>25.437.267.583</b>
	1. Alat-alat Besar	5 unit	3.235.483.418
	2. Alat-alat Angkutan	39 unit	14.977.416.849
	3. Alat Bengkel dan Alat Ukur	44 unit	190.854.000
	4. Alat Pertanian	0 unit	0
	5. Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.077 unit	4.789.809.216
	6. Alat Studio dan Alat Komunikasi	227 unit	1.687.548.200
	7. Alat-alat Kedokteran	21 unit	63.507.500
	8. Alat-alat Laboratorium	0 unit	0
	9. Alat-alat Persenjataan/Keamanan	65 unit	492.648.400
3	Gedung dan Bangunan	<b>17 unit</b>	<b>9.388.974.350</b>
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	<b>14</b>	<b>6.218.950.800</b>
	Aset Tetap Lainnya	<b>237</b>	<b>52.819.709.396</b>
1	Buku Perpustakaan	221 buku	54.528.000
2	Barang Bercorak Kebudayaan	1	24.940.000
3	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0	0
4	Aset Tetap Renovasi	15	52.740.241.396
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	<b>0</b>	<b>0</b>
	Aset Tidak Berwujud	<b>3</b>	<b>204.550.000</b>
	Jumlah	<b>1.749</b>	<b>94.069.452.129</b>

\*Nilai aset berdasarkan draft laporan asset tahun 2019

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 18 (delapan belas) unit kendaraan roda empat, 10 (sepuluh) unit kendaraan roda enam dan 20 (duapuluh) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor secara umum relatif sudah tersedia meliputi 4 ruang rapat, ruangan untuk tiap bidang, 1 ruangan sekretariat, gudang logistik, gedung PUSDALOPS PB, Pos induk/ Mako TRC, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi relative baik. Secara kuantitatif rasio perangkat computer (personal computer/ laptop) dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1, tetapi kurang kompatibel dengan kebutuhan teknologi terkini. Perangkat multimedia juga sudah tersedia akan tetapi beberapa sudah tidak dapat difungsikan secara maksimal sesuai tuntutan kerja. Kondisi genset kantor sudah tidak sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan dan sudah berumur lebih dari 10 tahun, sehingga kurang optimal dalam mendukung kinerja. Dengan demikian secara keseluruhan ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai.

**Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2018 dan 2019**

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
2018	Rp. 2.939.278.013,00	Rp. 86.908.971.530,00	Rp. 89.848.249.543,00
2019	Rp. 3.253.988.182,00	Rp. 89.318.911.450,00	Rp. 92.572.899.632,00

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPBD DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2019 dibanding tahun 2018 terdapat kenaikan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.409.939.920,00 atau sebesar 2,77%. Hal ini menunjukkan tidak ada kendala anggaran untuk membiayai program/kegiatan BPBD DIY.

### 1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2018

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Surat Inspektur DIY Nomor : 700/01371 tanggal 6 Mei 2019, perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Rekomendasi:	Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dilakukan dengan langkah-langkah berikut: 1. Laporan Kinerja (LKj) 2018 telah disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) tepat waktu yaitu paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir;</li> <li>2. Meningkatkan kinerja khususnya dalam hal pencapaian <i>Output</i> kegiatan yang pada tahun 2018 belum tercapai;</li> <li>3. Meningkatkan kinerja yang terkait dengan unsur-unsur dalam penilaian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Capaian kinerja terkait Hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Siklon Cempaka yang tidak dapat direalisasikan pada Triwulan IV Tahun 2018 telah dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2019 sesuai rencana.</li> <li>3. Peningkatan kinerja yang terkait dengan unsur-unsur dalam penilaian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah melaksanakan pembinaan rutin kepegawaian dilaksanakan minimal 1 bulan sekali serta apel rutin;</li> <li>- Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin baik mingguan, bulanan, dan triwulanan dengan lebih memfokuskan pada capaian <i>kinerja</i>;</li> <li>- Telah dilakukan upaya peningkatan tertib administrasi, dokumentasi serta pelaporan meskipun belum memenuhi target untuk meningkatkan peringkat kinerja instansi.</li> </ul> </li> </ol>

# BAB 2

## Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

*Bab 2 Berisi :*

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan 2019
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Tahun 2019 merupakan tahun pertama penerapan Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*). Melalui Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY didesain paralel (*inline*) dengan alur (*cascading*) kinerja visi, misi, tujuan, sasaran, program Pemda, dan program OPD yang diamanatkan dalam dokumen RPJMD 2017 – 2022.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodir dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018.

### 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai cascade kinerja, BPBD DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah BPBD DIY selama lima tahun adalah: **“Menurunkan risiko bencana”**

Adapun sasaran BPBD DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

**Tabel II.1 Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY, 2017-2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka/ Indeks	64,5	68	71	74	77	80	80

## 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencegah timbulnya dan mengurangi risiko bencana di kawasan rawan bencana di DIY</li> <li>2. Mencegah &amp; menurunkan keterpaparan dan kerentanan masyarakat</li> <li>3. Meningkatkan resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, respon kedaruratan, dan pemulihan pasca-bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan pemahaman aparat dan masyarakat akan risiko bencana dengan penguatan kebijakan dan implementasi didasarkan pada pemahaman kerentanan, keterpaparan, kapasitas, karakteristik bahaya dan lingkungan</li> <li>2) Penguatan tata kelola risiko untuk mendorong kerjasama kemitraan, perbaikan/pengembangan mekanisme, penguatan kelembagaan pada pelaksanaan pengurangan risiko bencana &amp; pengelolaan sumber daya</li> <li>3) Peningkatan investasi PRB untuk ketangguhan/resiliensi dengan meningkatkan investasi publik dan swasta dalam mitigasi struktural dan non-struktural untuk meningkatkan ketahanan sebagai pendorong inovasi, pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja</li> <li>4) Peningkatan manajemen risiko dan manajemen krisis dengan memperkuat kesiapsiagaan, respon kedaruratan, dan pemulihan pasca-bencana di semua tingkatan</li> </ol>

## 2.3. Struktur Program dan Kegiatan 2019

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran BPBD DIY tahun 2019 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

**Tabel II.3.1. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2019**

Sasaran	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1. Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	1.1. Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	<b>6.636.573.800</b>
	1.1.1. Pengelolaan Pencegahan Bencana	4.266.909.800
	1.1.2. Pengelolaan Kesiapsiagaan Bencana	2.369.664.000
	1.2. Program Pengelolaan Kedaruratan Dan Logistik Bencana	<b>8.390.397.870</b>
	1.2.1. Pengelolaan Kedaruratan Bencana	1.649.391.470
	1.2.2. Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	4.620.576.400
	1.2.3. Pengelolaan Logistik Bencana	1.979.048.000
	1.2.4. Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana	141.382.000
	1.3. Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana	<b>70.764.821.800</b>
	1.3.1. Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Bencana	684.400.000
	1.3.2. Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pasca Bencana	70.080.421.800
<b>Total</b>	<b>85.791.793.470</b>	

**Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2019**

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2	3
1.	1. Program Administrasi Perkantoran	<b>1.966.869.980</b>
	1.1. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	990.976.000
	1.2. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	579.939.980
	1.3. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	395.954.000
2.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<b>1.351.864.000</b>
	1.1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	150.894.000
	1.2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	360.970.000
	1.3. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	840.000.000
3.	3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	<b>208.384.000</b>
	4.1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	14.000.000
	4.2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	15.000.000
	4.3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	152.732.000
	4.4. Monitoring dan Evakuasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	26.652.000
	<b>Total Anggaran Pendukung</b>	<b>3.527.117.980</b>

## 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana BPBD DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

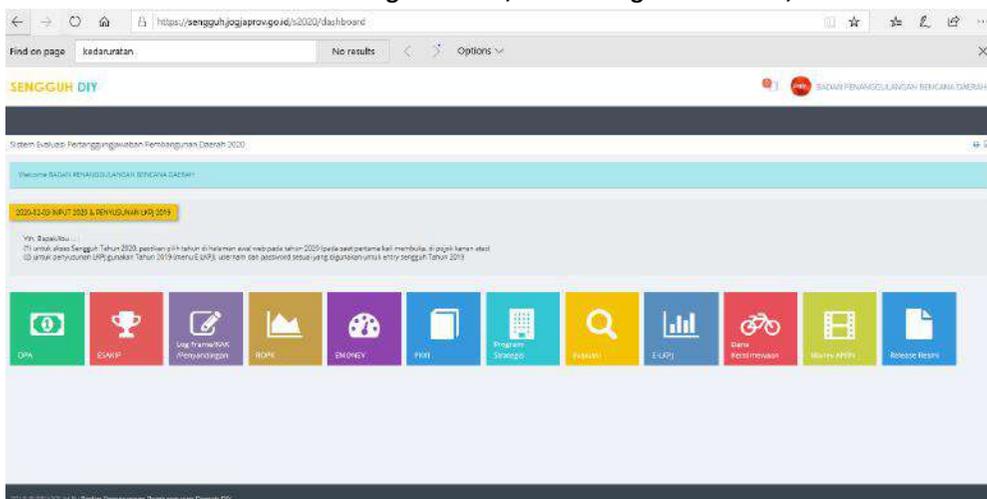
**Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana BPBD DIY Tahun 2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	71	Triwulan I	68,5
					Triwulan II	68,5
					Triwulan III	68,5
					Triwulan IV	71

## 2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi [sungguh.jogjaprov.go.id](http://sungguh.jogjaprov.go.id) yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

**Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP**



Sumber: <http://sungguh.jogjaprov.go.id/>

# BAB 3

## Akuntabilitas Kinerja

### **Bab 3 Berisi :**

1. *Capaian Kinerja Tahun 2019*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
4. *Realisasi Anggaran*
5. *Inovasi*

### **3.1. Capaian Kinerja Tahun 2019**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2019. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	Base line 2017	Capaian 2018	TAHUN 2019				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4			5	6	7	8	
1	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	<u>Indikator:</u> Indeks Ketahanan Daerah  <u>Meta Indikator:</u> Nilai Indeks Ketahanan Daerah di DIY	Angka	64,5	68,5	71	72,5	102	Sangat Baik	80

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

### 3.1.1. Sasaran 1: Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana

Kinerja sasaran meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana diukur dengan satu indikator yakni Indeks Ketahanan Daerah. Nilai indeks ketahanan daerah diperoleh melalui kajian atau pengukuran yang berpedoman pada Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.

Penjelasan hubungan antara sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai Indeks Ketahanan Daerah di DIY

Nilai Indeks Ketahanan Daerah merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan untuk pengurangan risiko bencana; dan penilaian indeks ketahanan daerah ditujukan untuk memberikan dasar yang kuat dalam peningkatan indeks ketahanan daerah untuk meredam risiko bencana. Penilaian indeks ketahanan daerah meliputi:

1. Penilaian regulasi, kelembagaan dan perencanaan;
2. Penilaian sistem informasi dan peringatan bencana

3. Penilaian upaya penelitian, pendidikan dan pelatihan terkait penanggulangan bencana;
4. Penilaian upaya pengurangan faktor-faktor risiko bencana;
5. Penilaian upaya kesiapsiagaan daerah untuk penanggulangan bencana.

*\*Tabel perhitungan Indeks Ketahanan Daerah terlampir.*

Kinerja sasaran meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel III. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019**

No	Indikator Sasaran	Capaian 2018	2019			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2019 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Ketahanan Daerah	68,5	71	72,5	$72,5/71 \times 100\% = 102$	80	90,63

*Keterangan kolom (6): Ada peningkatan nilai indeks ketahanan daerah sebesar 1,5 (2%) dari target yang ditentukan.*

Capaian target sasaran atau peningkatan nilai Indeks Ketahanan Daerah di DIY tersebut didukung oleh pencapaian target indikator program yang diampu oleh BPBD DIY sebagai berikut:

1. Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana: 25 desa/kelurahan
2. Peningkatan Sekolah Siaga Bencana (SSB)/ Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kawasan Rawan Bencana: 25sekolah
3. Rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana: 15 menit 53 detik
4. Indeks Pemulihan Pascabencana: 99

### **3.1.1.1. Data Dukung Capaian Hasil Indeks Ketahanan Daerah**

Sebagaimana dijelaskan dalam Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012 Penghitungan Indeks Ketahanan Daerah DIY dilakukan sebagai bagian dari penghitungan Indeks Risiko Bencana yang dilaksanakan pada akhir tahun 2019. Kajian risiko bencana untuk mendapatkan nilai indeks risiko bencana dilakukan pada 7 bencana yakni bencana Tsunami, Longsor, Erupsi Gunung Api, Gempa Bumi,

Banjir, Kekeringan, dan Cuaca Ekstrim. Indeks bernilai sama untuk seluruh kawasan pada suatu kabupaten/kota di DIY yang merupakan lingkup kawasan terendah kajian ini. Indeks diperoleh dengan melaksanakan diskusi terfokus kepada pelaku penanggulangan bencana melibatkan BPBD, Bappeda, Dinsos, Dinkes, UKM, Dunia Usaha, Universitas, LSM, Tokoh masyarakat, serta Tokoh Agama.

### **3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2019**

Berdasarkan Tabel III.4 Capaian Kinerja Tahun 2019, dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

#### **3.2.1. Sasaran 1: Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana**

- Target diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah tercapai 72,5 dengan demikian prosentase realisasi terhadap target 102% maka target tahun 2019 tercapai melebihi target.
- Dibandingkan realisasi tahun lalu 68,5 (100,7%), terdapat kenaikan sebesar 1,3%.
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD saat ini mencapai 90,62% dari target, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai sesuai target Indeks Ketahanan Daerah dengan skor 80 pada akhir periode RPJMD.
- Keberhasilan atas pencapaian target kinerja Indeks ketahanan daerah dapat diwujudkan karena peningkatan kapasitas dan komitmen aparatur dan masyarakat untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

### **3.3. Analisis Capaian Kinerja Lainnya**

Sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Pemerintah Daerah DIY telah menetapkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) sebagai dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030 dan mencakup indikator-indikator bagi pencapaian TPB/SDGs pada tingkat daerah. BPBD DIY berkontribusi dalam pencapaian 2 (dua) dari 17 (tujuhbelas) TPB/SDGs, yaitu tujuan ke-11 dan 13 sebagai berikut:

- 1) Tujuan TPB ke-11 yaitu “Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan.” Sasaran tujuan TPB ke-11 yang

tercakup dalam isu pencemaran lingkungan yaitu penanganan sampah dan limbah perkotaan, sedangkan sasaran yang tercakup dalam isu risiko bencana yaitu penurunan indeks risiko bencana, peningkatan kapasitas masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana, dan penyediaan sistem peringatan dini.

- 2) Tujuan TPB ke-13 yaitu “mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya” dengan sasaran menurunnya indeks risiko bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana.

Rencana Aksi Daerah TPB DIY telah disusun selaras dengan isu strategis pembangunan DIY yang tertuang dalam RPJMD DIY, capaian pada tahun 2019 merupakan tahun kedua dilakukannya pengukuran dan evaluasi capaian kinerja atas target SDGs / TPB.

**Tabel III.5. Target dan Capaian Indikator SDGs/TPB BPBD DIY Tahun 2019**

Nama Tujuan: Kota dan Pemukiman Berkelanjutan							
Nama Target: Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan							
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target SDGs Tahun Berjalan 2019	Capaian SDGs Tahun Berjalan 2019	Status (belum / akan / tercapai)
11.5.2	Indeks Risiko Bencana Indonesia	BPBD	Indeks	165	155	155	tercapai
11.5.3	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	BPBD	Indeks	65	71	72	tercapai
11.5.4	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk.	BPBD DIY	Desa/Kelurahan	189	239	243	tercapai
11.5.5	Jumlah sistem peringatan dini yang sudah terintegrasi.	BPBD DIY	Sistem Peringatan Dini	4	5	5	tercapai
11.5.6	Capaian indeks pemulihan pascabencana di DIY.	BPBD DIY	Indeks	50	70	99	tercapai
Nama Target: 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan							
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target SDGs Tahun Berjalan 2019	Capaian SDGs Tahun Berjalan 2019	Status
11.5.2	Persentase jumlah dokumen Rencana Kontijensi terhadap 5 (lima) jenis ancaman bencana di DIY.	BPBD DIY	%	n/a	80	40	belum tercapai
Nama Tujuan: Penanganan Perubahan Iklim							
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.							
Kode Indikator	Target / Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target SDGs Tahun Berjalan 2019	Capaian SDGs Tahun Berjalan 2019	Status (belum / akan / tercapai)
13.1.1	Persentase jumlah dokumen Rencana Kontijensi terhadap 5 (lima) jenis ancaman bencana di DIY.	BPBD DIY	%	n/a	80	40	belum tercapai
13.1.2	Persentase korban meninggal dan hilang terhadap jumlah kejadian bencana	BPBD DIY	%	12	11	31	belum tercapai

Sumber: Hasil monev RAD SDGs 2019

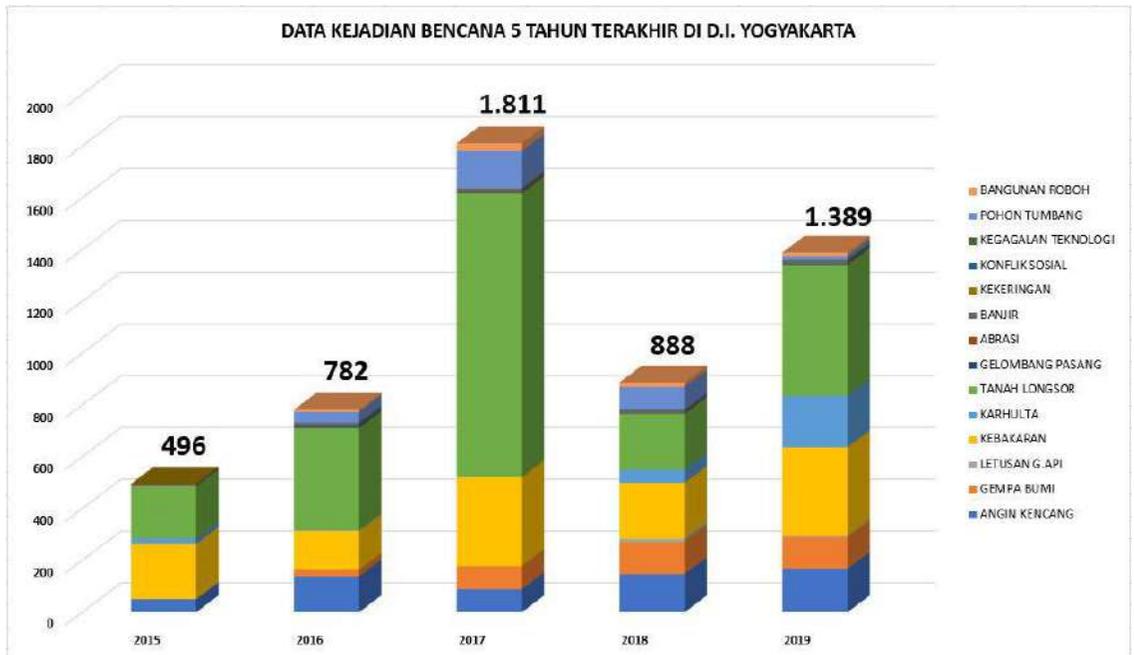
Pada evaluasi RAD SDGs/TPB DIY sebanyak 5 (lima) indikator dari 8 (delapan) indikator SDGs/TPB yang diampu BPBD DIY berhasil memenuhi target. Terdapat 3 (tiga) indikator dari 8 (delapan) indikator SDGs/TPB yang diampu BPBD DIY belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2019. Tingkat indeks risiko bencana di DIY merupakan hasil dari kajian terkini pada tahun 2019 yang dilakukan oleh BPBD DIY mencakup seluruh 5 kabupaten/kota dimana capaian tahun 2019 lebih tinggi daripada target yang telah ditetapkan. Perlu ada regulasi, kajian dan roadmap sebagai pedoman dan panduan dalam membangun sistem terutama sistem peringatan dini bencana yang terintegrasi di wilayah DIY sebagai kesatuan wilayah administrasi. Perhitungan Indeks Pemulihan pascabencana dilakukan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi lima sektor yang rusak akibat bencana yang terjadi sebelumnya.

Untuk indikator persentase jumlah dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) terhadap 5 (lima) jenis ancaman bencana di DIY baru tercapai (1 Renkon) 20% dari target 80% (4 Renkon), ditetapkan prioritas untuk menyusun Renkon Erupsi Gunung Merapi karena terjadi peningkatan status ke Level II (Waspada) sejak bulan Mei 2018 dan belum ada revisi penurunan status sepanjang tahun 2019.

Pada akhir tahun 2017 untuk pertama kalinya bencana hidrometeorologi atau cuaca ekstrim berupa siklon melanda DIY secara meluas dan dengan skala tinggi dan kondisi ini terus berulang di tahun 2018 dan 2019. Sehingga masyarakat maupun pelaku penanggulangan bencana di DIY perlu sigap menghadapinya.

Trend kejadian bencana di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dalam grafik III.1 dibawah ini. Table disusun berdasar data series kejadian bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2015-2019 untuk 14 jenis ancaman bencana.

**Gambar III.1 Data Series Kejadian Bencana di DIY periode 2015-2019**



Sumber: Data kejadian bencana di DIY diolah oleh Pusdalops BPBD DIY

### 3.4. Realisasi Anggaran

**Tabel III.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2019**

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	71	72,5	102	85.791.793.470	72.061.776.879	86,39
<b>Jumlah</b>						<b>85.791.793.470</b>	<b>72.061.776.879</b>	<b>86,39</b>
<b>Program pendukung</b>						<b>3.527.117.980</b>	<b>3.267.136.271</b>	<b>94,38</b>
<b>Total Belanja Langsung</b>						<b>89.318.911.450</b>	<b>75.328.913.150</b>	<b>83,94</b>

Berdasarkan tabel III.5 di atas dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp85.791.793.470,00 terealisasi Rp72.061.776.879,00 atau 86,39%. Sisa anggaran sebesar Rp13.730.016.591,00 atau 13,61% antara lain bersumber dari: sisa pengadaan barang dan jasa, efisiensi

belanja perjalanan dinas, efisiensi honor narasumber, serta belanja yang tidak direalisasikan.

Efisiensi atas pemakaian sumberdaya menghasilkan efisiensi belanja dari pembayaran listrik, air PDAM dan telfon sesuai tagihan sebesar Rp. 185.630.650,00. Sisa lelang dari dana hibah dari pusat yang menyebabkan sisa anggaran belanja langsung 2019 sebesar Rp. 11.508.066.104,00 dan dianggarkan kembali untuk kegiatan tahun 2020 sebesar 10.405.211.413,00. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk penanganan kerusakan-kerusakan akibat dampak Siklon Tropis Cempaka yang belum teranggarkan pada tahun sebelumnya.

Terkait pengembangan *Early Warning System* berupa pengadaan alat komunikasi kebencanaan terpadu tahap II yang tidak di jalankan karena terbentur dengan peraturan mengenai pengendalian perangkat telekomunikasi melalui IMEI dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Indentifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI).

Meskipun belanja tidak terserap 100% namun secara keseluruhan sasaran strategis OPD tercapai 102%, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi belanja sebesar Rp Rp13.730.016.591,00 (13,61%).

### **3.5. Inovasi**

Untuk mendukung pencapaian kinerja BPBD DIY menggunakan aplikasi yang dipergunakan Pemda DIY untuk mendukung capaian kinerja serta pelayanan berupa aplikasi *sungguh.jogjaprov.go.id* yang mengintegrasikan perencanaan, SIPKD yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan daerah, serta aplikasi E-Lapor DIY untuk mengelola layanan aduan.

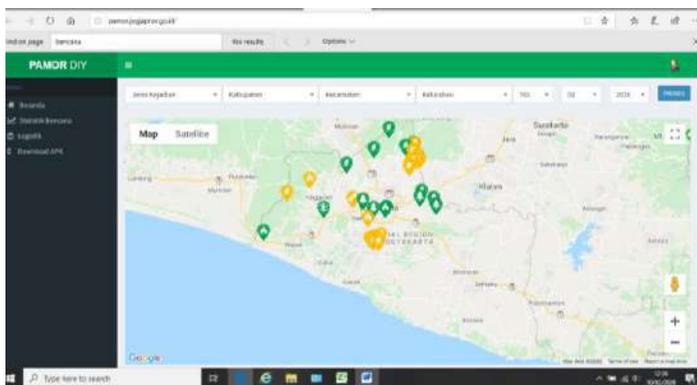
Selain itu BPBD DIY juga menggunakan instrumen pendukung penerapan pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana berupa aplikasi InaWARE dan DIBI yang terintegrasi secara nasional serta aplikasi PAMOR yang dikelola oleh Pusdalops PB BPBD DIY.

**Gambar III.2 Sistem informasi kebencanaan InaWARE**



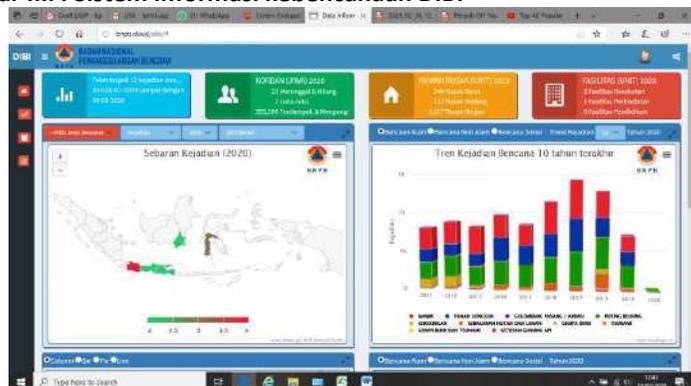
Sumber: <https://inaware.bnpb.go.id/inaware/>

**Gambar III.3 Sistem informasi kebencanaan PAMOR**



Sumber: <http://pamor.jogjaprov.go.id/>

**Gambar III.4 Sistem informasi kebencanaan DIBI**



Sumber: <http://bnpb.cloud/dibi/>

# BAB 4

## Penutup

### **Bab 4 Berisi :**

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada sasaran strategis BPBD DIY pada tahun 2019 telah berhasil melampaui target yang telah diperjanjikan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa efisiensi kinerja anggaran maupun efektivitas kinerja fisik dari BPBD DIY mampu mendorong pencapaian target yang sudah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Meskipun demikian, masih ada beberapa permasalahan yang patut menjadi perhatian dan menuntut solusi yang tepat.

1. Permasalahan yang dihadapi:
  - a. Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) membutuhkan strategi untuk mempercepat capaian mengingat kesenjangan antara capaian program dengan jumlah sekolah yang ada di kawasan rawan bencana.
  - b. Perlunya peningkatan kapasitas Desa Tangguh Bencana / Destana dalam rangka pengurangan risiko bencana
  - c. Banyaknya kawasan rawan bencana di DIY yang membutuhkan sistem peringatan dini bencana
  - d. Belum semua ancaman bencana telah disusun rencana kontijensinya
  - e. Perlunya strategi yang berkelanjutan dalam penanganan bencana kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta
  - f. Belum ada pengelolaan pengurangan risiko bencana pada kawasan strategis keistimewaan di DIY
  - g. Belum tersedianya lahan untuk relokasi warga masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana/ KRB III
  - h. Masih banyaknya permasalahan yang berpotensi menimbulkan bencana di kawasan sungai di DIY
2. Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:
  - a. Penyusunan pedoman dan pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana /SPAB mandiri serta meningkatkan koordinasi dengan Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY dan Kabupaten/Kota serta BPBD Kabupaten/Kota

- b. Pemenuhan sarana prasarana dalam rangka peningkatan kapasitas destana
- c. Perlunya semua kawasan rawan bencana terpasang sistem peringatan dini bencana
- d. Melengkapi rencana kontijensi sesuai dengan ancaman bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta
- e. Melakukan GerTRAP (Gerakan Tangkap Resapkan Alirkan dan Pelihara) air hujan dalam rangka mengatasi bencana kekeringan di DIY
- f. Perlu disusun kajian pengelolaan pengurangan risiko bencana pada kawasan strategis keistimewaan
- g. Mendorong warga dan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menyediakan lahan relokasi warga masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana/ KRB III
- h. Melakukan kajian rawan bencana di kawasan sungai di DIY

Adapun untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, diperlukan rencana aksi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan harmonisasi intensif baik secara internal BPBD DIY maupun eksternal dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.
2. Implementasi hasil perencanaan program/kegiatan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan ketercapaian target.
3. Dikarenakan penanggulangan bencana memerlukan sinergitas **penta-helix**, yaitu pemerintah, dunia usaha, akademisi/pakar, masyarakat dan media massa. Keterlibatan dunia usaha dalam penanggulangan bencana baik pada saat prabencana, saat tanggap darurat dan saat penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana mengingat investasi untuk penanggulangan bencana memerlukan anggaran yang tidak sedikit.

# LAMP IRAN



Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**( BPBD )**

Alamat : Jln. Kerasi No. 14a Yogyakarta, Telepon : (0274) 565836, Fax : (0274) 564266  
Website : <http://bpbd.yogyakarta.go.id> Email : [bpbd@yogyakarta.go.id](mailto:bpbd@yogyakarta.go.id) Kode Pos 55166

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. BIWARA YUSWANTANA, M.Si  
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD DIY  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X  
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, Januari 2019

  
GUBERNUR KEDUA  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA  
KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH DIY  
  
Drs. BIWARA YUSWANTANA, M.Si  
NIP. 19530517 198909 1 001

PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : BPBD DIY  
Tahun Anggaran : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	71	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	68,5 68,5 68,5 71

Jumlah Anggaran

: Rp. 87.358.258.250,00  
: Rp. 208.684.000,00  
: Rp. 1.948.975.980,00  
: Rp. 1.295.819.000,00  
: Rp. 5.141.583.000,00  
: Rp. 8.107.424.470,00  
: Rp. 70.655.771.800,00

Keterangan

Anggaran APBD : Rp. 87.358.258.250,00  
Anggaran Dekonsentrasi/ TP : Rp. 0

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
2. Program Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
5. Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana
6. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Yogyakarta, Januari 2019



PIHAK PERTAMA  
KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DIY



Drs. BIWARA YUSWANTANA, M.Si  
NIP. 19630817-198809 1 001 19621110



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**INSPEKTORAT**

Komplek Youth Center, Jalan Kebon Agung, Tiogoadi Mlati, Kabupaten Sleman  
Telepon (0274)562009 Faksimile (0274) 512567  
Website: <http://Inspektorat.jogjaprov.go.id> Email : [inspektorat@jogjaprov.go.id](mailto:inspektorat@jogjaprov.go.id)  
Kode Pos 55286

Yogyakarta, 06 - 05 - 2019

Nomor : 700/01371  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi  
atas Implementasi Sistem AKIP  
Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah DIY

Kepada

Yth. Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta  
di \_  
Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan tujuan:
  - a. Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem AKIP;
  - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Evaluasi (Evaluator) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
  1. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi:
    - 1) Perencanaan Strategis, meliputi sub komponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;
    - 2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi sub komponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, serta Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan;

6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2017 seperti tersebut pada angka 4, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY beserta seluruh jajarannya agar:
- Menyampaikan Laporan Kinerja (LKJ) tepat waktu yaitu paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - Meningkatkan kinerja khususnya dalam hal pencapaian *Output* kegiatan yang pada tahun 2018 belum tercapai;
  - Meningkatkan kinerja yang terkait dengan unsur-unsur dalam penilaian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2018, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



WYOS SANTOSO, S.E., M.Acc.

NIP. 19680215 199403 1 005

Tembusan :

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

ආචාර්ය විශ්වවිද්‍යාල ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රධාන විද්‍යාඥ

Alamat: Jalan Kenari No. 14a, Yogyakarta, Telp (0274) 555836, Fax (0274) 554206

Website: bpbd.jogjaprovo.go.id, Email: bpbd@jogjaprovo.go.id, Kode Pos: 55166

**TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJIP TAHUN SEBELUMNYA**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY**

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur DIY Nomor : 700/01371 tanggal 6 Mei 2019, perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY. Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) tepat waktu yaitu paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir;</li><li>2. Meningkatkan kinerja khususnya dalam hal pencapaian <i>Output</i> kegiatan yang pada tahun 2018 belum tercapai;</li><li>3. Meningkatkan kinerja yang terkait dengan unsur-unsur dalam penilaian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).</li></ol>	<p>Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dilakukan dengan langkah-langkah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan Kinerja (LKj) 2018 telah disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan</li><li>2. Capaian kinerja terkait Hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Siklon Cempaka yang tidak dapat direalisasikan pada Triwulan IV Tahun 2018 telah dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2019 sesuai rencana.</li><li>3. Peningkatan kinerja yang terkait dengan unsur-unsur dalam penilaian TPP antara lain:<ul style="list-style-type: none"><li>- Telah melaksanakan pembinaan rutin kepegawaian dilaksanakan minimal 1 bulan sekali serta apel rutin;</li><li>- Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin baik mingguan, bulanan, dan triwulanan dengan lebih memfokuskan pada capaian <i>kinerja</i>;</li><li>- Telah dilakukan upaya peningkatan tertib administrasi, dokumentasi serta pelaporan meskipun belum memenuhi target untuk meningkatkan peringkat kinerja instansi.</li></ul></li></ol>

Yogyakarta, 31 Desember 2019

Kepala Pelaksana

Drs. BIWARA YUSWANTANA, M.Si

NIP. 19630817 198909 1 001

## PERHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DAERAH DIY 2019

Ketercapaian *Indeks Ketahanan Daerah* merupakan bagian dari penilaian kapasitas pada angka Indeks Risiko Bencana, yang mempunyai Formula Penghitungan: Risiko merupakan Fungsi dari Ancaman x Kerentanan x 1/Kapasitas.

$$R = f(H*V/C)$$

Indeks Kapasitas dihitung berdasarkan indikator dalam Hyogo Framework for Actions (Kerangka Aksi Hyogo-HFA). HFA yang disepakati oleh lebih dari 160 negara di dunia terdiri dari 5 Prioritas program pengurangan risiko bencana. Pencapaian prioritas-prioritas pengurangan risiko bencana ini diukur dengan 22 indikator pencapaian.

### Komponen Indeks Kapasitas

BENCANA	KOMPONEN/INDIKATOR	KELAS INDEKS			BOBOT TOTAL	SUMBER DATA
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		
Seluruh Bencana	1. Aturan dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Tingkat Ketahanan 1 dan Tingkat Ketahanan 2	Tingkat Ketahanan 3	Tingkat Ketahanan 4 dan Tingkat Ketahanan 5	100%	FGD pelaku PB (BPBD, Bappeda, Dinsos, Dinkes, UKM, Dunia Usaha, Universitas, LSM, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama dll)
	2. Peringatan Dini dan Kajian Risiko Bencana					
	3. Pendidikan Kebencanaan					
	4. Pengurangan Faktor Risiko Dasar					
	5. Pembangunan Kesiapsiagaan pada seluruh lini					

Berdasarkan Kajian Indeks Risiko Bencana DIY tahun 2019 diperoleh skor kapasitas daerah sebagai berikut:

### Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana di DIY

No	Kab	Kec	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Jumlah Destana_Baru (BPBD DIY)	Jumlah Desa	kap_max	Skor	Rerata
1	BANTUL	Jetis Bantul	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	1	4	4	1,0	2,1
2	BANTUL	Banguntapan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1	7	4	1,1	
3	BANTUL	Piyungan	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	2	3	4	2,7	
4	BANTUL	Sedayu	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	2	4	4	2,0	
5	BANTUL	Sewon	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	1	4	4	2,0	
6	BANTUL	Kasihani	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	1	4	4	2,0	
7	BANTUL	Dlingo	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	3	6	4	2,0	
8	BANTUL	Bantul	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	1	5	4	1,0	
9	BANTUL	Pundong	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	3	3	4	4,0	
10	BANTUL	Pleret	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	2	5	4	1,6	
11	BANTUL	Imogiri	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	7	8	4	3,5	
12	BANTUL	Bambang lipuro	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	2	3	4	2,7	
13	BANTUL	Sanden	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	3	4	4	3,0	
14	BANTUL	Kretek	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	3	5	4	2,4	
15	BANTUL	Pandak	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	2	4	4	2,0	
16	BANTUL	Srandakan	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	2	2	4	4,0	
17	BANTUL	Pajangan	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	1	3	4	1,3	
18	GUNUNGKIDUL	Purwosari	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	5	5	3	3,0	1,9
19	GUNUNGKIDUL	Girisubo	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	4	8	3	1,5	
20	GUNUNGKIDUL	Semin	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	4	10	3	1,2	
21	GUNUNGKIDUL	Paliyan	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	7	7	3	3,0	

No	Kab	Kec	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Jumlah Destana_Baru (BPBD DIY)	Jumlah Desa	kap_max	Skor	Rerata
22	GUNUNGKIDUL	Ponjong	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	4	10	3	1,2	
23	GUNUNGKIDUL	Wonosari	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	14	14	3	3,0	
24	GUNUNGKIDUL	Playen	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	13	13	3	3,0	
25	GUNUNGKIDUL	Semanu	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	1	5	3	1,0	
26	GUNUNGKIDUL	Ngawen	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	4	6	3	2,0	
27	GUNUNGKIDUL	Sapto sari	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	1	7	3	1,0	
28	GUNUNGKIDUL	Patuk	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	6	11	3	1,6	
29	GUNUNGKIDUL	Tepus	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	3	5	3	1,8	
30	GUNUNGKIDUL	Tanjungsari	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	4	5	3	2,4	
31	GUNUNGKIDUL	Nglipar	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	4	7	3	1,7	
32	GUNUNGKIDUL	Rongkop	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	8	8	3	3,0	
33	GUNUNGKIDUL	Gedang sari	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	3	7	3	1,3	
34	GUNUNGKIDUL	Karangmojo	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	7	9	3	2,3	
35	GUNUNGKIDUL	Panggung	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2	6	3	1,0	
36	KOTA YOGYAKARTA	Jetis	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	3	3	3	4,0	
37	KOTA YOGYAKARTA	Danurejan	Ada	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	3	3	2	4,0	
38	KOTA YOGYAKARTA	Umbulharjo	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	7	7	3	4,0	
39	KOTA YOGYAKARTA	Gondokusuman	Ada	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	5	5	2	4,0	
40	KOTA YOGYAKARTA	Gondomanan	Ada	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	2	2	2	4,0	
41	KOTA YOGYAKARTA	Wirobrajan	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	3	3	3	4,0	
42	KOTA YOGYAKARTA	Kraton	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	3	3	3	4,0	
43	KOTA YOGYAKARTA	Mergangsan	Ada	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	3	3	2	4,0	
44	KOTA YOGYAKARTA	Tegalrejo	Ada	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	4	4	2	4,0	
45	KOTA YOGYAKARTA	Gedongtengen	Ada	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	2	2	2	4,0	

No	Kab	Kec	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Jumlah Destana_Baru (BPBD DIY)	Jumlah Desa	kap_max	Skor	Rerata
46	KOTA YOGYAKARTA	Pakualaman	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	2	2	3	4,0	
47	KOTA YOGYAKARTA	Ngampilan	Ada	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	2	2	2	4,0	
48	KOTA YOGYAKARTA	Mantrijeron	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	3	3	3	4,0	
49	KOTA YOGYAKARTA	Kotagede	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	4	4	3	4,0	
50	KULONPROGO	Galur	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	4	7	3	1,7	1,9
51	KULONPROGO	Lendah	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	2	6	3	1,0	
52	KULONPROGO	Temon	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	5	15	5	1,3	
53	KULONPROGO	Wates	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	4	8	3	1,5	
54	KULONPROGO	Samigaluh	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	6	6	3	3,0	
55	KULONPROGO	Kalibawang	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	4	4	3	3,0	
56	KULONPROGO	Kokap	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	5	5	3	3,0	
57	KULONPROGO	Pengasih	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	3	7	3	1,3	
58	KULONPROGO	Sentolo	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	3	8	3	1,1	
59	KULONPROGO	Panjatan	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	5	11	3	1,4	
60	KULONPROGO	Nanggulan	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	2	6	3	1,0	
61	KULONPROGO	Girimulyo	Ada	Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	4	4	3	3,0	
62	SLEMAN	Ngaglik	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	6	6	3	4,0	3,2
63	SLEMAN	Cangkringan	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	5	5	4	4,0	
64	SLEMAN	Kalasan	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	4	4	4	4,0	
65	SLEMAN	Pakem	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	5	5	4	4,0	
66	SLEMAN	Minggir	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	5	5	3	4,0	
67	SLEMAN	Ngemplak	Ada	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	5	5	2	4,0	
68	SLEMAN	Seyegan	Ada	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	5	5	2	3,0	
69	SLEMAN	Gamping	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	4	5	3	2,4	

No	Kab	Kec	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Jumlah Destana_Baru (BPBD DIY)	Jumlah Desa	kap_max	Skor	Rerata
70	SLEMAN	Mlati	Ada	Tidak	Ada	Tidak Ada	Ada	5	6	3	3,3	
71	SLEMAN	Godean	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	7	7	4	4,0	
72	SLEMAN	Tempel	Ada	Tidak	Ada	tidak Ada	Ada	8	8	3	4,0	
73	SLEMAN	Moyudan	Ada	Tidak	Ada	tidak Ada	Ada	4	4	3	4,0	
74	SLEMAN	Depok	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	3	3	4	3,0	
75	SLEMAN	Turi	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	4	4	4	4,0	
76	SLEMAN	Prambanan	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	6	6	4	4,0	
77	SLEMAN	Berbah	Ada	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	4	4	2	4,0	
78	SLEMAN	Sleman	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	5	5	4	4,0	
										Kapasitas	2,8	

**Tabel konversi skor**

<b>Skor</b>	<b>Nilai Indeks Ketahanan Daerah</b>
0-1	10-35
1-2	36-55
2-3	56-75
3-4	76-90
4-5	91-100

Berdasarkan perhitungan terhadap 5 indikator kapasitas pada 78 kecamatan di 5 kabupaten/Kota di DIY diperoleh skor Kapasitas 2,8 dengan Kabupaten Sleman menempati skor tertinggi dengan rerata 3,2 dan Gunungkidul terendah dengan skor 1,9. Skor kapasitas daerah dikonversi menjadi **Nilai Indeks Ketahanan Daerah** berdasarkan tabel diatas diperoleh angka 72,5.

Skor level 1 di berbagai kecamatan dihitung berdasarkan nilai kapasitas maksimal yang sudah menunjukkan level 3 bahkan level 4. Rendahnya skor level kapasitas tersebut disebabkan karena data desa tangguh bencana yang diperoleh menunjukkan jumlah yang sedikit rasionya dibandingkan jumlah desa keseluruhan di kecamatan tersebut. Hal ini perlu ditinjau baik dalam pembaharuan data ataupun meningkatkan jumlah desa tangguh bencana di kecamatan tersebut.

Pada level 2 seluruh kabupaten tidak diketahui adanya kajian risiko bencana terutama pada tahun ini. Pada Kabupaten Sleman terdapat kajian berupa rehabilitasi dan rekonstruksi Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 dan di Kabupaten Gunung Kidul terkait tanah retak oleh mahasiswa atau akademisi. Akan tetapi belum dilakukan kajian langsung dan tindak lanjut oleh BPBD maupun BNPB.

Pada level 3 beberapa kecamatan menunjukkan tidak adanya kegiatan seperti dalam bentuk sosialisasi, konsolidasi, dan berbagai kegiatan yang

berhubungan. Kegiatan yang dimaksud sesuai dengan level 3 tersebut tidak rutin dilakukan tiap tahunnya di seluruh desa di tiap kecamatan. Kegiatan tersebut pernah dilakukan di tahun sebelum-sebelumnya dan tidak dilakukan di tahun 2019.

Pada level 4 Kabupaten yang diketahui adanya upaya pengurangan risiko bencana adalah Bantul, Kulon Progo, dan beberapa kecamatan di Kabupaten Sleman. Bentuk upaya pada Kabupaten Bantul dan Sleman lebih kepada penanganan pengurangan risiko bahaya kebakaran sedangkan untuk Kabupaten Kulon Progo yakni merelokasi rumah warga yang sebelumnya terdampak bahaya longsor dan berdasarkan kenampakan di lapangan lokasi tersebut sudah tidak mampu untuk tetap ditinggali.